

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009)
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- BPNH, 2019, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Fred B.G. Tumbuan, “Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia,” (Jakarta, 7 Oktober 1999)
- G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999),
- G.U.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Isnaeni Moch., *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia* (Suatu Pengantar), UWKS Press, Surabaya.
- Kartikosari Heni dan Rusdianto Sesung, “Pembatasan jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia,” *Legality Vol. 25 No. 1*, (September 2017 – Februari 2018)
- Kusumaatmadja Muchtar dan Arief b. Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Lumban Tobing G.H.S., Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 2012, Cetakan ke 4.
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991.

- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
- Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003)
- Pardede Marulak, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Prasodjo Ratnawati W., 2010, *Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta: Mitra Ilmu.
- Rasijidi Lili dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak : Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Satrio J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Satrio J. , Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)
- Sjaifurachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Sunaryo Basuki. "Tanah Dan Bangunan Untuk Jaminan Kredit Menurut Ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan", disampaikan pada mata kuliah Tanah dan Bangunan Sebagai Jaminan Kredit.

Supramono Gatot.2013.Perjanjian Utang Piutang.Jakarta.Kencana Prenada Media Group.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Yudi Yuliadi dan Budiono Widagdo , 2020 Modul Best Practice Jaminan Fidusia Online Dalam Memberikan Kepastian Layanan (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020)

Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Jurnal/ Internet

Black's Law Dictionary 2nd Ed, Consequence, online pada

Black's Law Dictionary 2nd Ed, Consequence, online pada <https://thelawdictionary.org/consequence/>

Diah Sulistyani Muladi, Isue Sentralisasi Pengikatan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia, ditulis pada 28 April 2018, online pada <https://nusantarapos.co.id/hukum/22228/28/04/2019/isuesentralisasi->

- pengikatan-dan-pendaftaran-jaminan-fidusia/ diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 16.34 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Notaris & PPAT Dian R Yuniasari, Bekasi, pada tanggal 5 Februari
<https://thelawdictionary.org/juridical/>
- Ikhsan Bintang Arya Nurudin dkk, Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang), Volume 5, No. 3, 2019, Dipenogoro Law Journal, hlm. 2.
- Irma Devita, Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF Serta Dampaknya bagi Notaris, ditulis pada 27 Juni 2016, online pada <https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentangtata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/> diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 16.11 WIB
- Kemenkumham Lampung Selenggarakan Sosialisasi Layanan Jaminan Fidusia ditulisooleh Kanwil Lampung pada 17 Agustus 2017 online pada <http://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2334-kemenkumham-lampungsenggarakan-sosialisasi-layanan-jaminan-fidusia> diakses tanggal 20 April 2022 pukul 20.12 WIB
- Ni Wayan Tirtawati, Acta Comitatus 2016, Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia : Perspektif Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Perseroan Pegadaian, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, h. 295
- Nurhan, Analisis Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, 2018, hlm. 9, online pada <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/472/391> diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 12.42 WIB.
- Numan Muhammed, "Dasar-Dasar Kontrak Notariat Dan Struktur Anatomi Kontrak," (Makalah disampaikan pada Pclatihan Contract Drafling Pusdiklat Lab. Fakultas Hukum Universitas Islam Indoncsia, Yogyakarta, 18-19 Juni 2004)
- R. Suharto, Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu studi tentang Akta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara online), diponegoro private law review• vol. 1 no. 1 november 2017, halaman 68.
- Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya, hlm. 21